PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)
# BADAN KESATUAN BANGSA DA POLITIK
# 2025

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

JL. Pahlwan No.5 Payakumbuh

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lebih jauh, laporan ini disusun dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kinerja progam, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, akan tetapi kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami perlukan. Terima kasih.

Payakumbuh, Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota

**Drs. DEDDY PERMANA, MM**
NIP. 19670810 199809 1 002

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan gambaran pencapaian kinerja dari perangkat daerah didukung seluruh unit kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disertai dengan analisis terhadap pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis perangkat daerah dengan 5 (lima) indikator kinerja. Sasaran Strategis Pertama (S1) adalah "Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota", dengan indikator kinerja yang ditetapkan adalah "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada", capaian kinerja sebesar 103,82 % dengan predikat "Sangat Tinggi".

Sasaran Strategis Kedua (S2) adalah "Menurunnya Tingkat Konflik Sosial di Tengah Masyarakat", dengan indikator kinerja sasaran yang ditetapkan adalah "Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota" capaian kinerja sebesar 92,00 % dengan predikat "Sangat Tinggi".

Sasaran Strategis Ketiga (S3) adalah "Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah", dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai Indeks Reformasi Birokrasi IRB (IRB) dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian kinerja AKIB sebesar 113,05 dengan predikat "Sangat Tinggi". Capaian kinerja Indek Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 365,63 % dengan predikat "Sangat Tinggi". Capaian kinerja Indek Kepuasan Masyarakat sebesar 92,58 % dengan predikat "Sangat Tinggi".

# DAFTAR ISI


Kata Pengantar..... i
Ikhtisar Eksekutif..... ii
Daftar Isi..... iii
Daftar Tabel..... iv
Daftar Gambar..... v

**BAB I Pendahuluan.....** 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Tugas dan Wewenang..... 4
C. Dasar Hukum..... 8

**BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....** 12
A. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..... 12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 15

**BAB III Akuntabilitas Kinerja.....** 20
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja..... 20
B. Hasil Pengukuran Kinerja Organisasi..... 21
C. Analisis Capaian Kinerja..... 22
D. Realisasi Anggaran ..... 63

**BAB IV Penutup.....** 70
A. Kesimpulan..... 70
B. Langkah Peningkatan Di Masa Yang Akan Datang.... 71

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 1.1 | Jumlah Pegawai Menurut Golongan ..... | 7 |
| Tabel 1.2 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 8 |
| Tabel 2.1 | Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah..... | 14 |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah..... | 16 |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025..... | 17 |
| Tabel 2.4 | Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Banga dan Politik Tahun 2025 ..... | 18 |
| Tabel 2.5 | Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2025..... | 19 |
| Tabel 3.1 | Klasifikasi Penilaian..... | 20 |
| Tabel 3.2 | Hasil Pengukuran Kinerja Organisasi..... | 21 |
| Tabel 3.3 | Data-Data Pemilu Tahun 2024 ..... | 23 |
| Tabel 3.4 | Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial Tahun 2025 | 32 |
| Tabel 3.5 | Capaian Hasil Review Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ..... | 42 |
| Tabel 3.6 | Jenis Layanan Masyarakat pada Unit Layanan Badan Kebangpol..... | 53 |
| Tabel 3.7 | Nilai Interval, Nilai Interval Terkonversi dan Mutu Layanan..... | 55 |
| Tabel 3.8 | Realisasi Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025..... | 58 |
| Tabel 3.9 | Realisasi Anggaran Tahun 2025..... | 63 |

# DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 |
| Gambar 3.1 | Galeri Dokumentasi Pendidikan Politik Di SMA N 1 Harau ..... | 26 |
| Gambar 3.2 | Agenda Rapat Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025..... | 28 |
| Gambar 3.3 | Kegiatan Pendidikan Politik Badan Kesatuan Bangsan dan Politik..... | 29 |
| Gambar 3.4 | Acara Temu Ramah Ormas se-Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Polres Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025..... | 30 |
| Gambar 3.5 | Verifikasi Lapangan Keberadaan Organisasi Masyarakat di Jorong Kuranji Kecamatan Guguak Tahun 2025..... ..... | 31 |
| Gambar 3.6 | Fasilitasi Penyelesaian Konflik Keagamaan Al-Musafirin Di Kecamatan Harau..... | 34 |
| Gambar 3.7 | Kegiatan Rapat Forkopimda, Membicarakan Antisipasi Konflik Sosial di Tengah-Tengah Masyarakat Tahun 2025..... | 34 |
| Gambar 3.8 | Kegiatan Pertemuan Tim FKUB Tahun 2025.. | 35 |
| Gambar 3.9 | Ziarah dan Tabur Bunga Peringatan Gugurnya 9 Syuhada Tahun 2025..... | 37 |
| Gambar 3.10 | Peristiwa Situjuah ke 76 Tahun 2025..... | 37 |
| Gambar 3.11 | Koto Tuo Lautan Api Tahun 2025..... | 38 |
| Gambar 3.12 | Gerak Jalan Peringatan Pengumuman Kabinet PDRI Halaban Tahun 2025..... | 38 |
| Gambar 3.13 | Peringatan Bela Negara di Kantor Bupati Lima Puluh Kota ..... | 39 |
| Gambar 3.14 | Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2025 (17 Agustus).... | 40 |
| Gambar 3.15 | Rapat Tindak Lanjut LHE Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024..... ..... | 43 |
| Gambar 3.16 | Penandatanganan Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2025..... | 53 |

Gambar 3.17 Pengisian Kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Badan Kesbangpol Tahun 2025..... 55

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Berdasaran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan proses yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi orgranisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil *(result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dari pencapaian sasaran strategis organisasi perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut sangat ditentukan oleh

target-target yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikan kepala Kepala Daerah/Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen bersama antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja *(outcome)* yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja di setiap tahunnya.

Adapun tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bukanlah dokumen yang yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu indikator kinerja Utama, RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Laporan kinerja mendasarkan kepada pengukuran kinerja dalam artian pencapaian terhadap perjanjian kierja. Pengukuran kinerja menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan manajemen kinerja melalui penjaminan adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

a. Memberikan inforganisasi masyarakati kinerja yang terukur kepada Bupati Lima Puluh Kota.
b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kinerjanya.
c. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
d. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

## B. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dimana Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten.

Badan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik

sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pempinan daerah kabupaten;

f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati .

Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota secara lebih lengkap sebagaimana tertera dalam diagram berikut:

**Gambar 1.1**

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

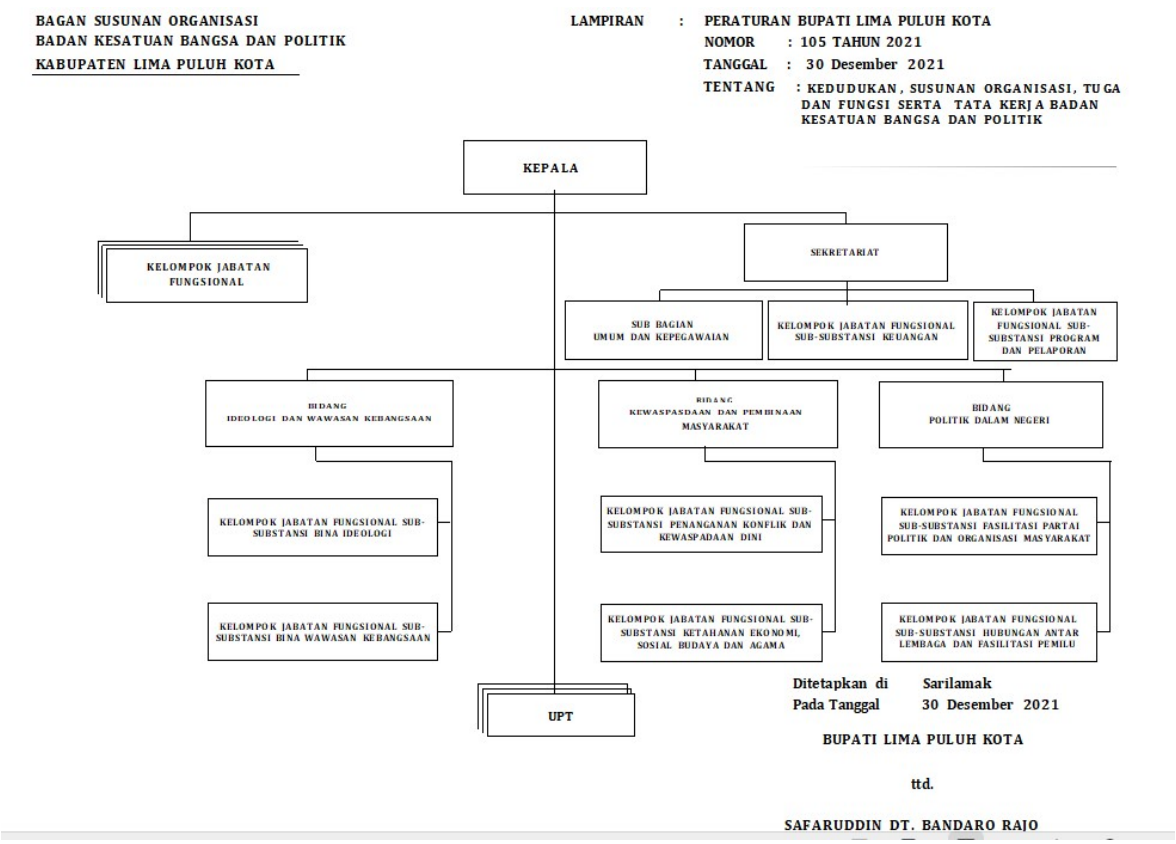


## Sumber Daya Manusia

Komposisi data sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa instansi ini didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang. Dari jumlah personel tersebut, sebanyak 26 (dua puluh empat) merupakan pegawai berstatus PNS, 1 (satu) orang P3K Penuh Waktu dan 6 (enam) orang berstatus P3K Paruh Waktu. Selanjutnya, berdasarkan golongan, jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

| No. | Unit Kerja | Golongan | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V | IV | III | II | I | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Kepala Badan | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2. | Sekretariat | 1 | 2 | 7 | | - | 10 |
| 3. | Bidang Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat | - | 1 | 4 | - | - | 5 |
| 4. | Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | - | 1 | 4 | | - | 5 |
| 5. | Bidang Politik Dalam Negeri | - | 1 | 4 | 1 | - | 6 |
| | **Jumlah** | 1 | 6 | 18 | 1 | - | 28 |

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 5 (lima) pegawai menempuh pendidikan pasca sarjana (S2), sebanyak 14 (empat belas) pegawai menempuh pendidikan Sarjana (S1) dan sebanyak 1 (satu) pegawai menempuh pendidikan Diploma (D3). Selanjutnya jumlah pegawai yang menempuh pendidikan SMA atau sederajat sebanyak 4 (empat) orang dan jumlah pegawai yang menempuh pendidikan SMP atau sederajat sebanyak 1 (satu) orang. Secara lebih lengkap, data pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut pendidikan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2**
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Unit Kerja | Pendidikan | | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S2 | S1 | DIII | SMA | SLTP | SD | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Kepala Badan | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2. | Sekretariat | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | 9 |
| 3. | Bidang Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat | - | 4 | - | 1 | - | - | 5 |
| 4. | Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | 1 | 3 | | 1 | - | - | 5 |
| 5. | Bidang Politik Dalam Negeri | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 6 |
| 6. | P3K Penuh Waktu | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 7. | P3K Paruh Waktu | - | 1 | - | 5 | - | - | 6 |
| | **Jumlah** | 5 | 16 | 1 | 10 | 1 | | 33 |

## C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041:
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforganisasi masyarakati Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
15. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Apartur Negara Dan Reforganisasi masyarakati Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4.41 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

# BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

## A. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 memuat Visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu "*Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".* Dalam mewujudkan visi tersebut, dipilih beberapa Misi pembangunan daerah sebagai penjabaran visi Kepala Daerah. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reforganisasi masyarakati birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembanguanan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait langsung dengan Misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam mendukung pencapaian visi misi kepala daerah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 2 (dua) tujuan perangkat daerah.

Tujuan strategis tersebut adalah:

1) Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat;

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik.

Selanjutnya sebagai perwujudan Tujuan strategis tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis perangkat daerah. Sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan indikator "Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada". Sasaran ini akan dicapai pada pelaksanaan pemilu dan pemilu kepala daerah tahun 2025.
2. Menurunnya tingkat konflik social di tengah masyarakat, dengan indikator "Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota".
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah, dengan indicator adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai Indeks Reforganisasi masyarakati Birokrasi (IRB) dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 diwujudkan dalam sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan urusan dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melaksanakan 6 program, 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, adapun program-program yang dilaksanakan tersebut adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

**Tabel 2.1**
Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat | | Indeks Ketahanan Sosial Budaya |
| | | Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota | Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada |
| | | Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat | Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 2 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| | | Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah | Nilai AKIP |
| | | | NIlai IRB |
| | | | Nilai IKM |

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022. Dalam ketentuan tersebut, termuat 3 (tiga) Sasaran strategis perangkat daerah dengan 5 (lima) Indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah tersebut seperti tertuang dalam Tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2**
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja utama | Formula Dasar Perhitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota | Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada | Jumlah pengguna hak pilih x 100%<br>Jumlah pengguna tahun lalu | KPU Kabupaten | Bidang Poldagri |
| 2. | Menurunnya tingkat konflik social di tengah masyarakat | Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota | Jumlah fasilitasi penyelesaian konflik social tahun n x 100%<br>Jumlah konflik social tahun n | Badan Kesbangpol | Bidang IWK<br>Bidang KPM |
| 3. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah | Nilai AKIP | Nilai AKIP berdasarkan hasil review Inspektorat | Badan Kesbangpol | Sekretariat |
| | | NIlai IRB | Nilai IRB berdasarkan hasil revium Inspektorat | Badan Kesbangpol | Sekretariat |
| | | Nilai IKM | Nilai IKM berdasarkan survey layanan perangkat daerah | Badan Kesbangpol | Sekretariat |

Dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan, disusun target pencapaian sasaran kinerja tahunan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sasaran strategis pertama yaitu "Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota" mempunyai target capaian indikator kinerja utama sebesar 62,90 %. Sasaran strategis kedua yaitu Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat" mempunyai target capaian indikator sebesar 100,00%. sedang asaran strategis ketiga yaitu "Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah" mempunyai indicator kinerja adalah Nilai AKIP, Nilai IRB dan Nilai IKM dengan target capaian indicator berturut-turut 66,00; 16 dan 86,00. Target-target tersebut sebagaimana tertuang dalam Table 2.3 berikut ini.

**Tabel 2.3**

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada | 62,90 % |
| 2. | Menurunnya tingkat konflik social di tengah masyarakat | Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota (%) | 100 % |
| 3. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah | Nilai AKIP | 66 % |
| | | Nilia IRB | 16 % |
| | | Nilai IKM | 86 % |

Penetapan perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan politik Tahun 2025 memuat 3 (tiga) Sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Sasaran strategis "Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota" dengan Indikator "Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada" sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis. Sasaran

strategis “Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat: dengan indikator “Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah” dengan 3 (tiga) indikator yaitu : Nilai AKIP, Nilai IRB dan Nilai IKM. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dimana target indikator kinerja tidak ada perubahan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

**Tabel 2.4**
Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada | 62,90 % |
| | Menurunnya tingkat konflik social di tengah masyarakat | Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota (%) | 100 % |
| 2. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah | Nilai AKIP | 66 % |
| | | Nilia IRB | 16 % |
| | | Nilai IKM | 86 % |

Dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan alokasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 sebesar 7.357.271.206,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam rupiah). Sedangkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2025 sebesar Rp 6.986.653.325,- (enam milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan kedalam sebanyak 6 (enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini.

**Tabel 2.5**
Program dan Kegiatan pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2025

| No | Program | Anggaran | |
|---|---|---|---|
| | | DPA | DPAP |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.640.107.412,- | 3.336.218.931, |
| 2. | Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 814.306.600,- | 837.407.200,- |
| 3. | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | 2.399.922.194,- | 2.664.732.194,- |
| 4. | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 19.595.000,- | - |
| 5. | Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 59.998.000,- | 24.180.000,- |
| 6. | Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik | 423.342.000,- | 124.115.000,- |
| | Total | **7.357.271.206,-** | **6.986.653.325,-** |

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja menggunakan metode pengukuran yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan /kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Kualifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

Klasifikasi Penilaian

| No. | Klasifikasi Penilaian | Predikat |
|---|---|---|
| (1) | (1) | (2) |
| 1. | 91% - 100% | Sangat Tinggi |
| 2. | 76% - 90% | Tinggi |
| 3. | 66% - 75% | Sedang |
| 4. | 51% - 65% | Rendah |
| 5. | < 50% | Sangat Rendah |

Selain membandingkan antara target dan realisasi tahun berjalan, metodologi pengukuran capaian kinerja juga mencakup perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja pada tahun tahun sebelumnya. Melengkapi metodologi tersebut dibandingkan pula capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra) maupun realisasi capaian yang ada dalam skala yang lebih luas (propinsi/nasional).

## B. Hasil Pengukuran Kinerja Organisasi

Hasil pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**
Hasil Pengukuran Kinerja Organisasi

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Predikat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada | 62,90 % | 65,30 | 103,82 | Sangat Tinggi |
| 2 | Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat | Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social di Kab. Lima Puluh Kota (%) | 100,00 | 92 | 92 | Sangat Tinggi |
| 3 | Meningkatnya kualitas dan | Nilai AKIP | 66,00 | 74,61 | 113,05 | Sangat Tinggi |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah | Nilai IRB | 16 | 58,5 | 365,63 | Sangat TInggi |
| | | Nilai IKM | 86,00 | 84,17 | 92,58 | Sangat Tinggi |
| **Rata-rata Capaian Indikator kinerja** | | | | | **154,47%** | **Sangat Tinggi** |

Hasil pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dengan capaian indikator kinerja yaitu **154,47%** menunjukkan bahwa sasaran strategis perangkat daerah tercapai dengan **Sangat Tinggi**. Sasaran pertama perangkat daerah mempunyai persentase capaaian 103,82 %. Capaian pada sasaran strategis kedua mempunyai capaian 92%. Selanjutnya capaian sasaran strategis ketiga yaitu capaian 113,05 % 1 (satu), capaian 365,63 % 1 (satu) indikator dan capaian 97,87 % 1 (satu) indikator. Capaian pada sasaran strategis ketiga untuk indikator Nilai IRB ini sejak Tahun 2023 tidak dihitung lagi dimana kita memakai Nilai IRB Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu 58,5 %.

## C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis terhadap capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2025 disajikan salah satunya dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, maupun antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada tataran yang lebih tinggi, misalnya standar nasional/propinsi.

*Analisis Capaian Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota; Indikator: Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada (%)*

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada pada Tahun 2024 menurun dari Tahun 2019, dimana pada Tahun 2024 partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pemilukada yaitu:

1. Pemilu (pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, DPD dan Pemilihan Presiden) dengan angka partisipasi pemilih yaitu 76,14 %. Angka partisipasi tersebut didapatkan dari jumlah pengguna hak pilih dibagi dengan jumlah DPT pemilu di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2024.

**Tabel 3.3**

Data- Data Pemilu Tahun 2024

**1. Jumlah DPT**

| Jumlah Kecamatan | Jumlah Nagari | Jumlah TPS | Laki-Laki | Perempuan | Total (L+P) |
|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **79** | **1.261** | **143.841** | **148.264** | **292.105** |

**2. Hasil Pemilu DPRD LIMA PULUH KOTA**

| Partai | Rincian | | | | | Total Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | Dapil 4 | Dapil 5 | |
| PKB | 2.908 | 382 | 4.275 | 3.544 | 1.549 | 12.658 |
| GERINDRA | 6.047 | 4.595 | 4.229 | 5.465 | 3.073 | 23.409 |
| PDIP | 3.717 | 2.621 | 1.493 | 995 | 355 | 9.181 |
| GOLKAR | 6.049 | 7.677 | 9.673 | 5.752 | 6.073 | 35.224 |
| NASDEM | 7.085 | 5.845 | 5.548 | 6.763 | 3.177 | 28.418 |
| PARTAI BURUH | 119 | 197 | 311 | 284 | 75 | 986 |
| PARTAI GELORA | 219 | 41 | 439 | 133 | 63 | 895 |
| PKS | 5.887 | 3.392 | 6.465 | 8.103 | 3.655 | 27.502 |
| PKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANURA | 2.012 | 203 | 1.824 | 3.460 | 191 | 7.690 |
| PARTAI GARUDA | 1.399 | 453 | 376 | 1.017 | 118 | 3.363 |
| PAN | 4.235 | 1.585 | 6.485 | 4.151 | 2.569 | 19.025 |
| PBB | 567 | 46 | 30 | 66 | 32 | 741 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOKRAT | 7.346 | 3.929 | 4.323 | 3.737 | 4.236 | 23.574 |
| PSI | 46 | 19 | 67 | 32 | 30 | 194 |
| PERINDO | 105 | 6 | 425 | 11 | 6 | 553 |
| PPP | 2.721 | 2.689 | 3.362 | 5.205 | 3.314 | 17.291 |
| PARTAI UMAT | 618 | 36 | 1.032 | 1.229 | 272 | 3.187 |
| **Jumlah Suara Sah** | **51.080** | **33.716** | **50.357** | **49.947** | **28.788** | **213.888** |

**3. Partisispasi Memilih**

| No | Jenis Pemilihan | Angka Partisipasi |
|---|---|---|
| 1 | PPWP | 76,34 % |
| 2 | DPR-RI | 76,12 % |
| 3 | DPD-RI | 76,20 % |
| 4 | DPRD-PROVINSI | 76,09 % |
| 5 | DPRD KAB DAPIL 1 | 77,06 % |
| 6 | DPRD KAB DAPIL 2 | 79,91 % |
| 7 | DPRD KAB DAPIL 3 | 76,42 % |
| 8 | DPRD KAB DAPIL 4 | 73,82 % |
| 9 | DPRD KAB DAPIL 5 | 73,36 % |
| **RATA-RATA** | | **76,14 %** |

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota) dengan angka partisipasi pemilih yaitu 54,46 %. Angka partisipasi pemilih ini diperoleh dari jumlah pengguna hak pilih dibagi dengan jumlah DPT pilkada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

**PARTISIPASI PEMILIH PILKADA 2024**

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

| NO | NAMA KECAMATAN | TPS | DATA PEMILIH | | | PENGGUNA HAK PILIH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR | | | | PENGGUNA HAK PILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI | | | | PARTISIPASI PEMILIH PILGUB | PARTISIPASI PEMILIH PILBUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DPT | DPK | JUMLAH | DPT | DPTb | DPK | JUMLAH | DPT | DPTb | DPK | JUMLAH | | |
| 1 | SULIKI | 31 | 11.646 | 3 | 11.649 | 6.774 | 47 | 3 | 6.824 | 6.748 | 25 | 3 | 6.776 | 58,58% | 58,17% |
| 2 | GUGUAK | 59 | 27.457 | 30 | 27.487 | 14.956 | 25 | 30 | 15.011 | 14.956 | 23 | 30 | 15.009 | 54,61% | 54,60% |
| 3 | PAYAKUMBUH | 58 | 27.688 | 16 | 27.704 | 14.863 | 30 | 16 | 14.909 | 14.863 | 30 | 16 | 14.909 | 53,82% | 53,82% |
| 4 | LUAK | 43 | 21.475 | 12 | 21.487 | 11.559 | 31 | 12 | 11.602 | 11.559 | 31 | 12 | 11.602 | 54,00% | 54,00% |
| 5 | HARAU | 86 | 40.952 | 33 | 40.985 | 21.902 | 70 | 33 | 22.005 | 21.854 | 63 | 33 | 21.950 | 53,69% | 53,56% |
| 6 | PANGKALAN KOTO BARU | 47 | 21.819 | 11 | 21.830 | 11.269 | 27 | 11 | 11.307 | 11.269 | 27 | 11 | 11.307 | 51,80% | 51,80% |
| 7 | KAPUR IX | 45 | 21.362 | 11 | 21.373 | 11.851 | 42 | 11 | 11.904 | 11.851 | 38 | 11 | 11.900 | 55,70% | 55,68% |
| 8 | GUNUANG OMEH | 25 | 10.737 | 7 | 10.744 | 6.212 | 12 | 7 | 6.231 | 6.212 | 12 | 7 | 6.231 | 58,00% | 58,00% |
| 9 | LAREH SAGO HALABAN | 69 | 29.733 | 8 | 29.741 | 16.305 | 25 | 8 | 16.338 | 16.305 | 22 | 8 | 16.335 | 54,93% | 54,92% |
| 10 | SITUJUAH LIMO NAGARI | 39 | 17.608 | 10 | 17.618 | 9.590 | 60 | 10 | 9.660 | 9.590 | 59 | 10 | 9.659 | 54,83% | 54,82% |
| 11 | MUNGKA | 43 | 20.350 | 10 | 20.360 | 10.850 | 45 | 10 | 10.905 | 10.850 | 45 | 10 | 10.905 | 53,56% | 53,56% |
| 12 | BUKIK BARISAN | 44 | 18.073 | 8 | 18.081 | 9.994 | 21 | 8 | 10.023 | 9.994 | 13 | 8 | 10.015 | 55,43% | 55,39% |
| 13 | AKABILURU | 48 | 21.965 | 14 | 21.979 | 11.866 | 18 | 14 | 11.898 | 11.866 | 17 | 14 | 11.897 | 54,13% | 54,13% |
| | KABUPATEN | 637 | 290.865 | 173 | 291.038 | 157.991 | 453 | 173 | 158.617 | 157.917 | 405 | 173 | 158.495 | 54,50% | 54,46% |

Hal ini terjadinya karena terbatasnya anggaran Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melakukan sosialisasi bagi masyarakat pemilih untuk berpartisipasi dalam penyukseskan Pemilu dan Pemilukada pada Tahun 2024. Namum demikian pemberian pendidikan politik melalui sosialisasi telah dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu).

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilikada dihitung dengan rumus yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Pengguna Hak Pilih}}{\text{Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)}} \times 100$$

Realisasi diperoleh dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum + Jumlah Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah}}{2} \text{ X } 100$$

$$\frac{76{,}14 + 54{,}46}{2} \text{ X } 100$$

$$= 65{,}30\ \%$$

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dapat terjadi karena adanya koordinasi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pihak terkait. Para pihak tersebut diantaranya perangkat daerah terkait, partai politik, lembaga perwakilan, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Karang Taruna, Pemuda, Nagari dan Perangkat Nagari, pemuka masyarakat dan para pihak lainnya.

Pada program ini dilaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan Partai Politik, pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan diberikan kepada 10 (sepuluh) partai politik yang mendapatkan kursi pada DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Bantuan keuangan diberikan dalam 2 tahap, berdasarkan perolehan suara Pemilu 2019 dan hasil pemilu 2024.

Masa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Tahun 2024, khususnya Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah berupa fasilitasi setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai kebutuhan penyelenggara Pemilu. Untuk kegiatan pendidikan politik ataupun kegiatan lain yang mendukung untuk peningkatan partisipasi adalah dengan pembuatan spanduk, baliho serta banner berupa himbauan memilih kepada masyarakat se Kabupaten Lima Puluh Kota. Sosialisasi terkait peningkatan partisipasi pemilih, tidak dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan pendidikan politik, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap selalu berkoordinasi dengan KPU maupun Bawaslu terhadap kegiatan pendidikan politik yang mereka dilakukan. Akan tetapi sosialisasi tersebut belum mampu meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan capaian yang berkurang dari Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah periode sebelumnya.

Pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan kegiatan pendidikan politik di SMA N 1 Kecamatan Harau dengan sasaran kelompok pemilih generasi muda. Kegiatan ini mempunyai tema “Merawat Semangat Demokrasi Generasi Muda Pada Era Digital”. Sub stansi dari kegiatan ini dapat membentuk dan mengaktifkan nalar generasi muda untuk menunjukkan perhatian, ketertarikan dan sikap kritis dalam menanggapi seputar peristiwa sosial politik.

Kualitas Demokrasi akan mengalami peningkatan ketika terlihat semakin banyak pemilih atau masyarakat aktif memberikan pemikiran, berkegiatan dan menggunakan hak pilih pada agenda kontestasi politik. Hasil antara target dan realisasi pada kegiatan pendidikan politik menunjukkan capaian yang sesuai berdasarkan target yang ditetapkan.

Kegiatan pendidikan politik ini ditargetkan dihadiri 100 orang siswa dengan kehadiran pada saat acara mencapai 100 orang.

**Gambar 3.1**
**Galeri Dokumentasi Pendidikan Politik**
**Di SMA N 1 Kecamatan Harau Agustus 2025**

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan materi pendidikan politik yang memiliki manfaat dan tujuan membangkitkan semangat demokrasi generasi muda atau kalangan pemilih pemula. Beberapa materi pendidikan politik itu adalah 1; Peningkatan literasi digital, 2; Bagaimana memanfaatkan media IT untuk komunikasi politik, 3; Mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan demokrasi seperti menyuarakan pendapat, 4; Mengajak siswa rutin mengadakan kegiatan diskusi interaktif dan partisipasi yang bisa diwujudkan dalam agenda proses pemilihan ketua OSIS.

Materi pendidikan politik yang disampaikan ini diharapkan dapat diterima dan ditangkap makna pesannya oleh kalangan pemilih pemula. Generasi muda memegang andil besar pada perhelatan pemilu 2029 dan pilkada 2029 nanti. Pemilih pemula merupakan kelompok pemilih yang memiliki jumlah besar dari seluruh total DPT berdasarkan data pemilu 2024. Output dari agenda pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ini dapat meningkatkan minat

pemilih untuk berpartisipasi dalam agenda pemilu dan pemilukada pada tahun 2029.

Pendidikan politik juga tersalurkan pada program pemberian bantuan keuangan partai politik kepada 10 partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 200.1.5/58/BUP-LK/II/2025 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 terdapat 10 partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan bantuan keuangan dengan total sebesar Rp 974.117.189,89.

**Gambar 3.2**
**Agenda Rapat Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025**

Bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik. Dengan diberikan bantuan keuangan kepada partai politik diharapkan partai politik meningkatkan fungsi pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan politik adalah meningkatkan pemahaman pengetahuan politik dan demokrasi yang luas bagi masyarakat agar partisipasi masyarakat meningkat pada pemilu dan pemilukada.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota juga rutin membuat kajian tentang masalah sosial politik yang bertujuan memberikan pengetahuan pendidikan politik kepada masyarakat. Kajian itu berbentuk poster, pamflet, artikel dan majalah. Kajian itu akan di upload di media Instagram dan Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Gambar 3.3**
**Kegiatan Pendidikan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota**

Kegiatan pendidikan politik diwujudkan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan luas tentang sosial politik dapat diakses, mengunduh dan membaca majalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Masyarakat yang memiliki pengetahuan politik yang luas akan terhindar dari sikap apatis politik yang menjadi penyebab menurunnya indeks demokrasi.

Pada program pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota bersama dengan Polisi Resort (Polres) Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan acara temu ramah organisasi masyarakat se-Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka mendukung program pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

***Gambar 3.4***
***Acara Temu Ramah organisasi masyarakat Se-Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Polres Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025***

Organisasi Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan dapat bekerjasama dengan aparat kepolisian dalam mencegah dan memberantas perbuatan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, asusila, narkoba dan kejahatan lainnya. Penting bagi Pemrintah Daerah yang diwakilan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, Polres Kabupaten Lima Puluh Kota dan organisasi masyarakat se-Kabupaten 50 Kota bekerjasama mencegah dan menindak perbuatan tersebut. Tujuannya agar keamanan, ketertiban dan kenyaman terawat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Kota juga rutin melakukan verifikasi lapangan keberadaan organisasi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memvalidasi keberadaan dan kebasahan dokumen organisasi masyarakat. Verifikasi lapangan organisasi masyarakat juga bertujuan untuk menilai apakah organisasi masyarakat aktif menjalankan programnya dan apakah program tersebut positif serta bermanfaat bagi masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota selalu membangun kerjasama dengan organisasi masyarakat untuk mendukung program pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjaga kerukunan.

**Gambar 3.5**
**Verifikasi Lapangan Keberadaan Organisasi Masyarakat di Jorong Kuranji Kecamatan Guguak Tahun 2025**

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran stategis I pada Tahun Anggaran 2025 terdiri atas 1 (satu) progam. Program pertama adalah Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan alokasi anggaran yaitu 2.664.732.194,- (dua miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 2.635.282.199,- (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan sembilan rupiah) atau 98,89%.

*Analisis Capaian Sasaran Strategis II: Menurunnya Tingkat Konflik Sosial di tengah Masyarakat; Indikator: Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Social di Kabupaten Lima Puluh Kota (%).*

Selama Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) kali rangkaian fasilitasi penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Fasilitasi ini lebih tinggi dibanding yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 13 (tiga belas) kasus. Pelaksanaan fasilitasi tersebut terakomodir melalui Program

Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Program tersebut dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 65.782.000,- *(Enam Puluh Lima JUta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)*. Anggaran ini mengalami penyesuaian pada tahun anggaaran berjalan, program ini dilaksananakan dengan pagu sebesar Rp 58.625.000,- *(Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)*.

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2025, sebanyak 4 (empat) kegiatan rapat terkait kasus-kasus atau konflik sosial ditengah masyarakat. Selanjutnya terdapat kasus sosial yang juga muncul kembali ditengah-tengah masyarakat yang juga menjadi perbincangan di tingkat provinsi. Kasus tersebut adalah potensi konflik terkait dengan berhubungan masalah tanah ulayat di Nagari Harau Kecamatan Harau serta persoalan yang berhubungan dengan pertanian gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyelesaian permasalahan ini sepertinya masih memerlukan kerjasama yang intens antar instansi yang terkait, tidak hanya mengandalkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semata.

Pada Tahun 2025, dilaksanakan sebanyak 18 (Delapan Belas) kali fasilitasi penyelesaian potensi konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah fasilitasi penyelesaian konflik dan dapat diselesaikan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan laporan/inforganisasi masyarakati yang diterima. Penanganan konflik sosial ini dilakukan dan terfasilitasi setelah adanya langkah-langkah penanganan konflik yang dilakukan dari tingkat Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Kecamatan. Prosentase penanganan konflik yang dicapai sebesar 94,44%, artinya konflik yang dapat selesaikan adalah sebanyak 17 (tujuh belas) laporan dari 18 (delapan belas) laporan yang diterima. Sementara terdapat 1 (satu) konflik yang tidak dapat diselesaikan karena konflik tersebut sudah berada di ranah Aparat Penegak Hukum (APH). Dari fasilitasi yang dilaksanakan dapat di fasilitasi keseluruhan persoalannya.

**Tabel 3.4**
Fasilitasi Penyelesaian Potensi Konflik Sosial Tahun 2025

| No | Potensi Konflik | Lokasi | Waktu Kejadian | Status Kasus |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Aksi damai mahasiswa politani payakumbuh | Kantor Bupati Lima Puluh Kota | 5 Mei 2025 | selesai |
| 2. | Mediasi masalah penutupan jalan Ponpes di Sariak Laweh di aula | kantor Camat Akabiluru | 17 Februari 2025 | selesai |
| 3. | Pertemuan dengan Camat dan Wali Nagari Sarik Laweh persoalan penutupan jalan kepesan tren Upas | Kec. Akabiluru | 23 April 2025 | selesai |
| 4. | Rapat Masalah Wali Nagari | Nagari Tj. Bungo | 30 Januari 2025 | selesai |
| 5. | Rapat mediasi. Masalah pengeroyokan dan pengusiran warga | Tanjung Bungo | 7 Januari 24 | selesai |
| 6. | Aksi damai mahasiswa politani payakumbuh | Kantor Bupati Lima Puluh Kota | 4 juni 2025 | selesai |
| 7. | Kunjnungan Kerja Reses MP III Komisi IV DPR RI | Tarantang | 21 Juni 2025 | selesai |
| 8. | Penyampaian Petisi LSM GIB | Kantor Bupati dan DPRD Kab 50 Kota | 14 Mei 2025 | selesai |
| 9 | notulen audiensi aliansi honorer non data base bkn | Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota | 22 September 2025 | selesai |
| 10 | Pemantauan Sengketa Tanah Ulayat | Kecamatan Harau | 26 September 2025 | selesai |
| 11 | Aksi Damai | Sungai Kamuyang | 17 Juli 2025 | selesai |
| 12 | Audiensi Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tanggal | ruang rapat bupati lima puluh kota. | 18 september 2025 | selesai |
| 13 | Pengawasan Orang Asinng | Kecamatan Pangkalan Koto Baru | 2 Oktober 2025 | selesai |
| 14 | Pemantauan Pelepasan Jamaah Calon Haji 1446H | Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota | 19 Mei 2025 | selesai |
| 15 | Tabligh akbar 3 Hari masjid al-furqan | Piladang | 20 Juni 2025 | selesai |
| 16 | Pemantauan WNA Sudan | Kecamatan Guguak | 9 Juli 2025 | selesai |
| 17 | Pemantauan Kegiatan Jambore Majelis Mujahidin | Nagari Harau Kecamatan Harau | 26 - 29 Juni 2025 | selesai |

Berdasarkan pemaparan tersebut serta memperhatikan Tabel 3.5 diatas, capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial adalah sebesar 98,74 % dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi”. Keberhasilan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian potensi konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat dipengaruhi oleh jalinan kerjasama antar instansi yang telah terjalin erat selama ini. Dukungan Polisi, TNI, Kejaksaan, Perangkat Daerah terkait, Instansi Vertikal Lainnya serta peran aktif masyarakat dalam terwujudnya stabilitas keamanan di daerah dan menghindari berkembangnya konflik sosial dalam skala yang lebih besar.

**Gambar 3.6**
**Fasilitasi Penyelesaian Konflik Keagamaan Al-Musafirin di Kecamatan Harau**

**Gambar 3.7**
**Kegiatan Rapat Forkopimda, Membicarakan Antisipasi Konflik Sosial di Tengah-Tengah Masyarakat Tahun 2025**

Analisis terhadap keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan menemukan bahwa Program dan Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Nagari dan Jorong, dan instansi terkait lainnya sehingga permasalahan yang ada di lapangan segera dapat diatasi.

**Gambar 3.8**
**Kegiatan Pertemuan Tim FKUB Tahun 2025**

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran stategis II pada Tahun Anggaran 2025 yang didukung oleh 2 bidang terdiri atas 3 (tiga) progam yaitu:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan alokasi anggaran yaitu 24.180.000,- (dua puluh empat juta seratus delapan puluh ribu) dengan realisasi sebesar Rp 19.050.000,- (sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) atau 48,78%.
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan alokasi anggaran yaitu Rp. 124.115.000 (seratus dua puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.

108.450.000 (seratus delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau 87,38%.

3. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi anggaran yaitu 837.407.200,- (delapan ratus tiga tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 802.882.417,- (delapan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah) atau 95,88%.

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja didukung dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam rangkaian peringatan Hari Bela Negara yang jatuh setiap tahunnya pada tanggal 19 Desember. Adapun program pendukung utama capaian tersebut adalah Pogram penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan pagu anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2025 sebesar Rp 198,844,000.00,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah). Adapun realisasi keuangan dari program ini adalah sebesar Rp 802.882.417,- (delapan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah) atau 98,97%.

Rangkaian peristiwa sejarah tersebut dilaksanakan di 7 (tujuh) titik lokasi dengan realisasi 5 (lima) titik yaitu:

1. Peringatan Peristiwa Gugurnya 9 (sembilan) Suhada di Titian Dalam Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh tanggal 10 Januari 2025 dengan Upacara Tabur Bunga dengan peronil TNI, Polri, ASN, Mahasiswa, Pelajar dan Tokoh Masyarakat.

**Gambar 3.9**
**Ziarah dan Tabur Bunga Peringatan Gugurnya 9 Syuhada Tahun 2025**

2. Peringatan Peristiwa Situjuah dilaksanakan upacara bendera dengan tertib tata upacara militer dan ziarah di 3 (tiga) lokasi makam yaitu makam lurah kincia nagari Situjuah Batua, Makam Situjuah Banda Dalam Nagari Situjuah Banda Dalam dan Makam Situjuah Gadang Nagari Situjuah Gadang tanggal 15 Januari 2025 dengan personil TNI, Polri, ASN, Mahasiswa, Pelajar dan Tokoh Masyarakat.

**Gambar 3.10**
**Peristiwa Situjuah Ke 76 Tahun 2025**

3. Peringatan Koto Tuo Lautan Api dilaksana gerak jalan santai lintas sejarah yang diikuti oleh pelajar, karang taruna, ASN tanggal 10 Juni 2025.

**Gambar 3.11**
**Koto Tuo Lautan API Tahun 2025**

4. Peringatan Peristiwa Pengumuman Kabinet PDRI di Halaban dilaksanakan gerak jalan santai yang diikuti oleh pelajar, karang taruna, ASN tanggal 22 Desember 2025.

**Gambar 3.12**
**Gerak Jalan Peringatan Pengumuman Kabinet PDRI Halaban Tahun 2025**

5. Peringatan Hari Bela Negara dilaksanakan Upacara Bendera dengan tertib tata upacara militer yang dilaksanakan di Gedung Museum PDRI Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh tanggal 19 Desember 2025 dengan personil TNI, Polri, ASN, Mahasiswa, Pelajar dan Tokoh Masyarakat.

**Gambar 3.13**

**Peringatan Bela Negara di Kantor Bupati Lima Puluh Kota**

Dimana 2 (dua) titik tidak terlaksana dikarenakan bertepatan dengan kegiatan nagari sehingga pihak nagari kurang merespon terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di nagari tersebut.

1. Peristiwa Perundingan Antara Pemberi Mandat/Pemerintah RI dengan Pimpinan PDRI Padang Japang tanggal 6 Juni 1949.

2. Peristiwa Rapat Umum Pimpinan PDRI dengan masyarakat di Koto Kaciak tanggal 7 Juni 1949. tidak terlaksana kegiatan 2 (dua) titik ini Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditunjang dengan telah terjalinnya kerja sama yang baik dengan unsur FORKOPIMDA, instansi vertical, aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta tokoh masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Gambar 3.14**
**Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2025**
**(17 AGUSTUS)**

Menyelenggarakan kegiatan pembentukan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025, Seleksi awal dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2025. pada seleksi hari pertama ini dihadiri oleh 238 (dua ratus tiga puluh delapan) peserta dari SMA/SMK/MA se-Kabupaten Lima Puluh Kota, yang terdiri dari 119 putra dan 119 putri. Jumlah peserta yang lulus pada seleksi awal adalah sebanyak 75 (tujuh puluh tiga) peserta. Seleksi ini dibagi ke dalam 2 (dua) sesi. Sesi pertama yaitu Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diikuti oleh 75 (tujuh puluh tiga peserta).

Pada kegiatan ini jumlah peserta yang dibutuhkan sebagai Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 28 orang yang terdiri dari 15 Putra dan 13 Putri yang berasal dari siswa-siswi SLTA yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan ini tidak dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota akan tetapi dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota dan sesuai dengan kebijakan dalam regulasi dari pemerintah pusat kegiatan tersebut dialihkan menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Disamping itu pada tahun 2024 ini terdapat 1 (satu) orang siswa dari SLTA di Kabupaten Lima Puluh Kota yang lulus seleksi

Paskibraka Tingkat Provinsi Sumatera Barat sekaligus menjadi utusan dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dimana pada tahun 2025 siswa SLTA yang lulus seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Sumbar yang sekaligus menjadi utusan dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 4 (empat) orang siswa sehingga pada tahun ini terdapat pengurangan sebanyak 3 (tiga) orang peserta.

Pada pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai unsur yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain perangkat daerah terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pihak penyelenggara pendidikan paskibraka Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk keterlibatan pihak eksternal yaitu TNI, Polri dan tenaga kesehatan dari Kabupaten Lima Puluh Kota dan organisasi PPI Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur pendidik dan pelatih pada tahap pembentukan sekaligus keterlibatan instansi tersebut pada saat penugasan pada pelaksanaan upacara peringatan HUT RI. Keterlibatan unsur utama lain pada kegiatan ini adalah pihak SLTA yang ada diwilayah Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pihak yang mengirim calon anggota Paskibraka. Sedangkan keterlibatan instansi lainnya pada pemerintah pusat yaitu BPIP RI selaku pembina Paskibraka Tingkat Nasional.

*Analisis Capaian Sasaran Strategis III: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah; Indikator I: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).*

Capaian terhadap Sasaran Strategis III Indikator I Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana termaktub Dalam Tabel 3.5 berikut ini. Hasil nilai tersebut berdasarkan Review terhadap Laporan Akintabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 yang keluar hasil nya pada bulan Juni 2025 dengan nilai capaian hasil review akuntabilitas kinerja sebesar 74,61. Sedangkan hasil review

akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 mempunyai capaian sebesar 70,19.

**Tabel 3.5**
Capaian Hasil Review Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| No | Aspek | Nilai Maks | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (3) | (4) |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30,00 | 26,89 | 26,89 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 30,00 | 21,01 | 21,01 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15,00 | 10,08 | 10,20 |
| 4. | Evaluasi Internal/Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00 | 12,21 | 16,04 |
| 5. | Pencapaian sasaran/ kinerja organisasi | - | - | - |
| | **Jumlah** | **100,00** | **70,19** | **74,61** |

Berdasarkan haris evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperoleh nilai 74,61 kateri BB dengan kategori **Sangat Baik**.

**Gambar 3.15**
Rapat Tindak Lanjut LHE Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil review akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024, beberapa catatan perlu dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya dalam meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dimasa mendatang pada aspek-aspek dengan capaian kurang atau sedang. Hal yang dapat dilakukan tidak jauh dari rekomendasi yang diberikan terkait laporan hasil review tersebut. Adapun rekomendasi yang disampaikan Inspektorat telah ditindaklanjuti dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 adalah:

A. Perencanaan Kinerja

   Dalam penyempunaan pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota telah ditindaklanjuti dengan menambahkan bagan Crosscutting yang menjelaskan hubungan OPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) dengan OPD Lain dan pihak terkait. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada bagan Crosscutting dibawah ini.

**Bagan 1**
**Crosscutting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

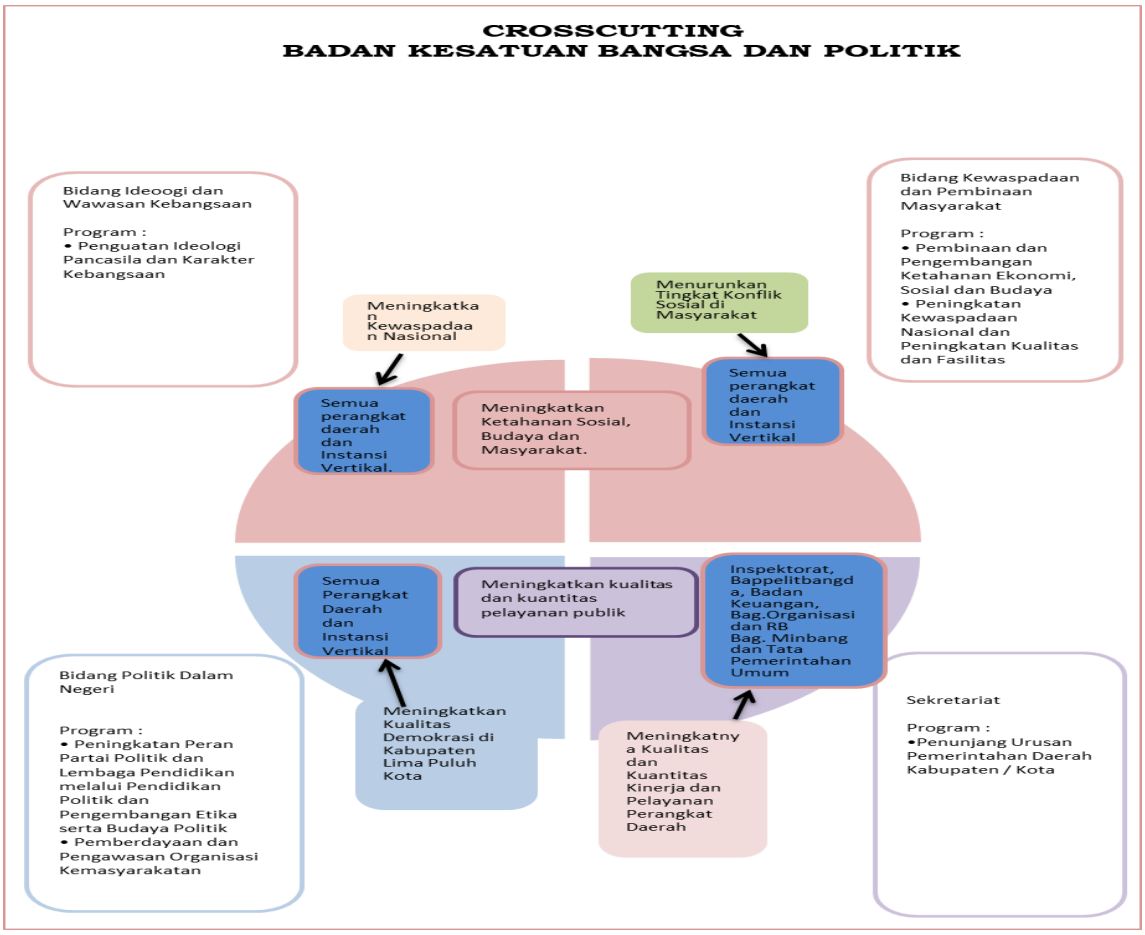


B. Pengukuran Kinerja

Laporan pemantauan Pengukuran Kinerja atau notulen rapat yang menjelaskan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hal ini dapat dilihat pada Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan I s/d Triwulan IV dimana Pengukuran Kinerja ini dilakukan setiap Triwulan mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV. Pengukuran Kinerja diukur dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag dan Fungsional yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Capaian Kinerja Perangkat Daerah s/d Triwulan IV**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024**

| Kode Jabatan | Jabatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realiasi Triwulan | | | | Jumlah Realisasi | % | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Kepala Badan Kesbangpol | Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota | Persen | 100 | | | 75 | 17 | 92 | 92,00 | Pengukuran Kinerja yang menjelaskan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan I s/d Triwulan IV dimana Pengukuran Kinerja ini dilakukan |
| | | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilu kepala daerah | persen | 70 | 0 | - | | 65,3 | 65,3 | 93,29 | |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai | 66 | | 70,09 | | 0,1 | 70,19 | 106,35 | |
| | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 86 | | | 79,62 | | 79,62 | 92,58 | |
| | | Nilai Indeks Reforganisasi masyarakati Birokrasi | Indeks | 16 | | | 58,5 | | 58,5 | 365,63 | |
| 02 | Sekretaris Badan Kesbangpol | NIlai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 66 | - | 70,09 | | 0,1 | 70,19 | 106,35 | |
| | | Indeks Reforganisasi masyarakati Birokrasi | Indeks | 16 | - | - | 58,5 | 0 | 58,5 | 365,63 | |
| | | Persentase realisasi keuangan akhir tahun perangkat daerah | Persen | 95 | 2,37 | 5,05 | | | 7,42 | 7,81 | |
| | | Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam kondisi "Baik" | Persen | 80 | 61 | 5 | 5 | | 71 | 88,75 | |
| | | Persentase ASN pada perangkat daerah dengan kinerja “Baik” | Persen | 100 | | 95 | | | 95 | 95,00 | |
| | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 86 | - | - | 79,62 | | 79,62 | 92,58 | |
| 03 | Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | Jumlah peringatan peristiwa bela negara dan rangkaian peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota yang meliputi 7 titik kegiatan | Titik lokasi kegiatan | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 71,43 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah kegiatan iven dan lomba tentang perjuangan: lomba lagu perjuangan, lomba cerdas cermat perjuangan, jalan santai lintas sejarah dan lomba puisi perjuangan | Iven lomba | 5 | | | 0 | 2 | 2 | 40,00 | setiap Triwulan mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV. Pengukuran Kinerja diukur dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag dan Fungsional yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Jumlah persiapan pembentukan Paskibraka | lokasi | 5 | 5 | | | 0 | 5 | 100,00 | |
| | | Jumlah Proses Seleksi Pasibraka | Sekolah | 34 | 34 | | | 0 | 34 | 100,00 | |
| | | Jumlah Pemusatan Diklat Paskibraka | Lokasi | 1 | | 1 | | | 1 | 100,00 | |
| | | Jumlah Pengumuman hasil seleksi Paskibraka | Dokumen | 1 | | 1 | | | 1 | 100,00 | |
| | | Jumlah Pengukuhan Paskibraka | Kegiatan | 1 | | | 1 | | 1 | 100,00 | |
| | | Jumlah Pelaksanaan Tugas Paskibraka | Orang | 34 | | | 28 | | 28 | 82,35 | |
| | | Jumlah Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | Kegiatan | 1 | | | | | 0 | 0,00 | |
| | | Jumlah pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka duta Pancasila | Orang | 28 | | | | | 0 | 0,00 | |
| | | Jumlah pembinaan terhadap aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | Orang | 28 | | | | | 0 | 0,00 | |
| 04 | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri | Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota | Persen | 100 | | | 75 | | 75 | 75,00 | |
| | | Jumlah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat | organisasi masyarakat | 35 | 7 | 9 | 0 | 19 | 35 | 100,00 | |
| | | Jumlah pembinaan partai politik | parpol | 10 | 0 | 10 | 0 | | 10 | 100,00 | |
| | | Jumlah verifikasi bantuan keuangan partai politik | parpol | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | 100,00 | |
| | | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilu kepala daerah | persen | 70 | 0 | | 0 | 65,3 | 65,3 | 93,29 | |
| | | Jumlah monitioring evaluasi dan pelaporan perkembangan situasi politik di daerah | kecamatan | 13 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 100,00 | |
| 05 | Kepala Bidang Kewaspadaan dan Pengawasan Masyarakat | Jumlah laporan koordinasi aliran kepercayaan masyarakat yang dilaksanakan | kecamatan | 13 | 4 | 3 | | 6 | 13 | 100,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah laporan /notulen koordinasi Forum Kerukunan umat beragama yang dilaksanakan | notulen | 8 | - | 1 | | 3 | 4 | 50,00 | |
| | | Jumlah pemantauan situasi dan kondisi kerukunan umat beragama dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat | Kecamatan | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | 100,00 | |
| | | | Nagari | 79 | 17 | 14 | 15 | 33 | 79 | 100,00 | |
| | | Jumlah sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) | Kali | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi Fasilitasi P4GN | orang | 60 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | |
| | | Jumlah kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | Notulen/ Rekomendasi | 10 | 2 | 1 | | | 3 | 30,00 | |
| | | Jumlah kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dilaksanakan | Notulen | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 70,00 | |
| | | Jumlah pemantauan situasi dan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Kecamatan | 13 | 6 | 2 | | 5 | 13 | 100,00 | |
| | | | Nagari | 79 | 19 | 8 | | 52 | 79 | 100,00 | |
| 06 | Perencana Muda Subkoordinator Program dan Pelaporan | NIlai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 66 | | 70,19 | | | 70,19 | 106,35 | |
| | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA) | Dokumen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100,00 | |
| | | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (LKPJ, LPPD, LKJIP dan SPIP) | Dokumen | 86 | 21 | 21 | 21 | 23 | 86 | 100,00 | |
| | | Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah | Dokumen | 26 | 11 | 11 | 2 | 2 | 26 | 100,00 | |
| | | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah | laporan | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100,00 | |
| | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | laporan | 18 | 3 | 4 | 4 | 7 | 18 | 100,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah | Indeks Reforganisasi masyarakati Birokrasi | NIlai | 16 | 0 | 0 | | 58,5 | 58,5 | 365,63 | |
| | | Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah | Persen | 95 | 2,37 | 5,05 | | 87,58 | 95 | 100,00 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 86 | 0 | 0 | 79,62 | 6,38 | 86 | 100,00 | |
| | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemeringah (SAP) | Laporan | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 100,00 | |
| | | Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya | Orang | 25 | 23 | 23 | | -21 | 25 | 50,00 | |
| | | Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun | Laporan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | |
| | | Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun | Laporan | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100,00 | |
| 08 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi “Baik” | Persen | 80 | 61 | 5 | 5 | 9 | 80 | 100,00 | |
| | | Persentase ASN pada perangkat daerah dengan kinerja “Baik” | Persen | 100 | | 95 | | 5 | 100 | 100,00 | |
| | | Persentase usulan kenaikan pangkat, usulan pensium, usulan KGB yang diproses tepat waktu | Persen | 100 | 85 | 4 | 1 | 10 | 100 | 100,00 | |
| | | Dokumen data kepegawaian yang akurat | Dokumen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | |
| | | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | Laporan | 1 | | | 1 | 0 | 1 | 100,00 | |
| | | Persentase pejabat pada perangkat daerah yang mengisi LHKASN | Persen | 100 | | 100 | | 0 | 100 | 100,00 | |
| | | Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi | orang | 2 | 2 | | | 0 | 2 | 100,00 | |
| | | Tersusunnya dokumen Laporan BMD | Laporan | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 100,00 | |
| | | Persentase pemeliharaan Asset/BMD tepat waktu | Persen | 100 | 1 | | 80 | 19 | 100 | 100,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah unit pengadaan BMD | Unit | 6 | | | | | 0 | 0,00 | |
| 09 | Sub Koordinator Bina Wawasan Kebangsaan | Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) | Kali | 6 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 33,33 | |
| | | Jumlah persiapan pembentukan Paskibraka | lokasi | 5 | 5 | | | | 5 | 100,00 | |
| | | Jumlah Proses Seleksi Pasibraka | Sekolah | 34 | 34 | | | | 34 | 100,00 | |
| | | Jumlah Pemusatan Diklat Paskibraka | Lokasi | 1 | | 1 | | | 1 | 100,00 | |
| | | Jumlah Pengumuman hasil seleksi Paskibraka | Dokumen | 1 | | 1 | | | 1 | 100,00 | |
| | | Jumlah Pengukuhan Paskibraka | Kegiatan | 1 | | 1 | | | 1 | 100,00 | |
| | | Jumlah Pelaksanaan Tugas Paskibraka | Orang | 34 | | | 28 | | 28 | 82,35 | |
| | | Jumlah Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | Kegiatan | 1 | | 1 | | | 1 | 100,00 | |
| | | Jumlah pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka duta Pancasila | Orang | 28 | | 0 | | | 0 | 0,00 | |
| | | Jumlah pembinaan terhadap aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | Orang | 28 | | 0 | | | 0 | 0,00 | |
| 10 | Sub Koordinator Bina Ideologi | Jumlah peringatan peristiwa bela negara dan rangkaian peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota yang meliputi 7 titik kegiatan | Titik lokasi kegiatan | 7 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 28,57 | |
| | | Jumlah kegiatan iven dan lomba tentang perjuangan: lomba lagu perjuangan, lomba cerdas cermat perjuangan, jalan santai lintas sejarah dan lomba puisi perjuangan | Iven lomba | 5 | | | | | 0 | 0,00 | |
| 11 | Sub Koordinator Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitasi Pemilu | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilu kepala daerah | Persen | 70 | 76,14 | | | | 76,14 | 108,77 | |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan situasi politik di daerah | Laporan | 12 | 3 | 3 | 3 | | 9 | 75,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sub Koordinator Fasilitasi Parpol dan organisasi masyarakat | Jumlah Rancangan rencana Acuan Kinerja tentang Pelaksanaan Koordinasi dan Peningkatan Peran Partai Politik seta pemberian bantuan keuangan parpol | dokumen KAK | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 100,00 | |
| | | Jumlah koordinasi dan pembinaan kepada pengurus partai politik terkait kualitas laporan pertanggungjawaban Bankeu Parpol | partai politik | 10 | 10 | 10 | 10 | | 30 | 300,00 | |
| | | Jumlah verifikasi bantuan keuangan partai politik | dokumen | 20 | 0 | 7 | 0 | | 7 | 35,00 | |
| | | Jumlah rancangan rencana acuan kinerja di bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat | dokumen KAK | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 100,00 | |
| | | Jumlah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat terkait fasilitasi penerbitan surat keterangan keberadaan organisasi masyarakat | laporan | 4 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 75,00 | |
| | | Jumlah pemantauan terkait dengan kegiatan organisasi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan perundang undangan | laporan | 12 | 3 | 3 | 3 | | 9 | 75,00 | |
| 13 | Sub Koordinator Bina Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama | Jumlah laporan koordinasi aliran kepercayaan masyarakat yang dilaksanakan | kecamatan | 13 | 4 | 3 | | | 7 | 53,85 | |
| | | Jumlah laporan /notulen koordinasi Forum Kerukunan umat beragama yang dilaksanakan | notulen | 9 | 0 | 1 | | | 1 | 11,11 | |
| | | Jumlah pemantauan situasi dan kondisi kerukunan umat beragama dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat | Kecamatan | 13 | 3 | 4 | 8 | | 15 | 115,38 | |
| | | | Nagari | 79 | 17 | 14 | 18 | | 49 | 62,03 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) | Kali | 2 | | | 0 | | 0 | 0,00 | |
| | | Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi Fasilitasi P4GN | orang | 60 | | | 0 | | 0 | 0,00 | |
| 14 | Sub Koordinator Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini | Jumlah kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | Notulen/ Rekomendasi | 10 | 2 | 1 | | | 3 | 30,00 | |
| | | Jumlah kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dilaksanakan | Notulen | 10 | 2 | 2 | 1 | | 5 | 50,00 | |
| | | Jumlah pemantauan situasi dan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Kecamatan | 13 | 6 | 2 | | | 8 | 61,54 | |
| | | | Nagari | 79 | 10 | 8 | | | 18 | 22,78 | |

**Rata Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)**

| | |
|---|---|
| Sekretariat | **111,97** |
| IWK | **68,28** |
| POLDAGRI | **108,74** |
| KPM | **48,83** |
| **Badan Kesbangpol** | **149,97** |

C. Pelaporan Kinerja

- Agar tahun berikutnya Dokumen Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menginfokan keseluruhan hal yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terkait langsung target kinerjanya dengan Level Nasional dan Kabupaten.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dapat melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemantauan Capaian Kinerja Internal.
- Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dapat melengkapi laporan monev kinerja yang menggambarkan pemantauan capaian kinerja internal.

Terhadap seluruh rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten, beberapa langkah perubahan telah dilakukan sebagai perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas dan juga peningkatan capaian kinerja perangkat daerah. Adapun perubahan atau perbaikan yang telah dilakukan antara lain:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah menyusun bagan crosscuting.
2. Badan Kesatuan dan Politik sudah melengkapi laporan capaian kinerja berjenjang.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak ada membandingkan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dilevel nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

**Gambar 3.16**
Penandatanganan Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2025

*Analisis Capaian Sasaran Strategis II: Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah; Indikator II: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).*

Layanan masyarakat pada unit layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota diberikan kepada masyarakat maupun layanan internal pegawai di lingkungan perangkat daerah. Layanan ini sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang telah di tetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan hasil identifikasi layanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat 7 (tujuh) kelompok layanan kepada masyarakat yang diampu oleh 3 (tiga) bidang dan 3 (tiga) kelompok layanan internal perangkat daerah yang diampu oleh sekretariat.

**Tabel 3.6**
Jenis Layanan Masyarakat pada Unit Layanan Badan Kesbangpol

| No. | Layanan | Bidang Terkait | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Penguatan Ideologi Pancasial, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental | IWK | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Pendidikan politik dan peningkatan demokrasi | POLDAGRI | - |
| 3. | Pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat | POLDAGRI | - |
| 4. | Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. | KPM | - |
| 5. | Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan Aliran Kepercayaan | KPM | - |
| 6. | Peningkatan Kewaspadaan dini, kerjasama intelelijen dan pengawasan orang asing | KPM | - |
| 7. | Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah | KPM | |
| 8. | Layanan Kepegawaian dan umum | Sekretariat | Layanan internal |
| 9. | Layanan keuangan | Sekretariat | Layananl internal |
| 10. | Layanan program dan Pelaporan | Sekretariat | Layanan internal |

Pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

MeIalui survei kepuasan masyarakat ini, diharapkan akan menjadi motivasi dan perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota. Berbagai cara telah ditempuh atau dilakukan guna memperbaiki pelayanan publik oleh setiap instansi pemerintah, namun

penyelenggaraan pelayanan publik masih tetap menjadi keluhan masyarakat karena tidak sesuai keinginan masyarakat.

**Gambar 3.17**
Pengisian Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Layanan Badan Kesbangpol Tahun 2025

Sesuai dengan hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan menunjukan terjadi sedikit pergeseran kualitas layanan pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu survey 2024 dan 2025. Hasil survey tahun 2024 yaitu 79,62 dengan predikat "Baik". sedangkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 yaitu 84,17 dengan predikat "Baik".

**Tabel 3.7**
Nilai Interval, Nilai Interval Konversi dan Mutu Layanan

| Nilai Persepsi | Nilai Interval Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|---|---|---|---|
| 1 | 25,00 – 64,99 | D | Tidak Baik |
| 2 | 65,00 – 76,60 | C | Kurang Baik |
| 3 | 78,61 – 88,30 | B | Baik |
| 4 | 88,31- 100,00 | A | Sangat Baik |

Survei Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan bahwa Unsur Pelayanan yang dianggap paling memuaskan adalah pada poin “Biaya/tariff” dan “Penanganan Pengaduan” dengan nilai rata-rata 3,500 dan 3,290. Sedangkan Unsur Pelayanan dengan poin terendah adalah nilai rata-rata 3,081 mengenai poin “Perilaku Pelaksanaan”. Secara umum dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan pada Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 mempunyai predikat capaian “Baik” dengan poin diatas 3,000.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran stategis III pada Tahun Anggaran 2025 didukung 1 progam yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.336.218.931 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.252.548.186 (tiga miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) atau 97,49%.

**Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Kinerja**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 31.824.968.888 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.716.210.548 atau 99,66% dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Capaian jauh lebih baik dari Tahun 2023, jumlah anggaran belanja perangkat daerah sebesar Rp 21.330.536.330,- (dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 21.287.647.261,- (dua puluh satu milyar dua ratus depalan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) atau sebesar 99,80%. sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%. Data tersebut

menunjukkan bahwa penggunaan segala sumber daya yang ada pada perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti anggaran, personel, asset dan kebijakan berjalan secara efisien. Tingkat efisiensi dalam pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota terlihat dari capaian kinerja pada masing masing progam dan kegiatan yang dilaksanakan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melaksanakan 5 program, 9 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam pelaksanaannya, program dengan pencapaian kinerja paling tinggi yaitu Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang berada pada Bidang Politik Dalam Negeri yaitu 98,89%. Selanjutnya program dengan capaian kinerja paling rendah adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebesar 78,76%.

**Tabel 3.8**
Realisasi Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja (satuan) | Pencapaian Kierja | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **I.** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)** | **95,00** | **95,00** | **100,00** | **Efsisien** |
| **1.1** | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)** | **95,00** | **95,00** | **100,00** | **Efsisien** |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, LKJiP, LKPJ, SPIP yang disusun | 5 | 5 | 100,00 | |
| | | | | | | |
| **1.2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)** | **95,00** | **95,00** | **100,00** | **Efsisien** |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan (orang bulan) | 22 | 27 | 100,00 | |
| | | | | | | |
| **1.3** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)** | **95,00** | **95,00** | **100,00** | **Efsisien** |
| 1.3.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis alat listrik yang diadakan (jenis) | 4 | 4 | 100,00 | |
| 1.3.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Komputer PC dan Gorden yang diadakan | 2 | 2 | 100,00 | |
| 1.3.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis ATK yang diadakan jumlah jenis alat kebersihan yang diadakan | 45 | 45 | 100,00 | |
| 1.3.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Jenis Barang yang dicetak Jumlah Lembar Pengadaan | 7 | 7 | 100,00 | |
| 1.3.5 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Porsi yang disediakan untuk | 12 | 12 | 100,00 | |

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja (satuan) | Pencapaian Kierja | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | melayani tamu (porsi) | | | | |
| 1.3.5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 24 | 24 | 100,00 | |
| | | | | | | |
| **1.4** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)** | **95,00** | **100,00** | **-** | |
| 1.4.1 | Pengadaan Mebel | Jumlah meja kerja pimpinan | 1 | 1 | | |
| 1.4.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan mesin (AC dan Scaner) | 2 | 2 | - | |
| | | | | | | |
| **1.5** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)** | **95,00** | **100,00** | **100,00** | **Efsisien** |
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Lembar Materai yang disediakan (buah) | 12 | 12 | 100,00 | |
| 1.5.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Kali Pembayaran Rekening Telfon, Listrik, Air | 12 | 12 | 100,00 | |
| 1.5.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan pembayaran honor Tenaga Harian Lepas | 6 | 6 | 100,00 | |
| | | | | | | |
| **1.6** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)** | **95,00** | **90,71** | **95,48** | **Efsisien** |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Dinas Roda 2 yang dibiayai pembayaran Pajak dan Perizinannya | 12 | 12 | 100,00 | |

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja (satuan) | Pencapaian Kierja | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang dibiayai Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Dinas yang dibiayai Pemeliharaan, Penggantian Suku Cadang dan Servisnya (unit) | | | | |
| 1.6.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit) | 12 | 9 | 75,00 | |
| | | | | | | |
| **2** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)** | **85,00** | **75,00** | **93,75** | **Efsisien** |
| **2.1** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)** | **85,00** | **75,00** | **93,75** | **Efsisien** |
| 2.1.1 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Peringatan 7 Titik Rangkaian Hari Bela Negara (lokasi) | 7 | 7 | 100,00 | |
| 2.1.2 | Pembentukan Paskibraka | Jumlah pembentukan paskibraka | 28 | 28 | 100,00 | |
| | | | | | | |
| **3** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik (%)** | **75,00** | **75,00** | **100,00** | **Efsisien** |
| **3.1** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika** | **Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik (%)** | **75,00** | **75,00** | **100,00** | **Efsisien** |

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja (satuan) | Pencapaian Kierja | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | **Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | | | | | |
| 3.1.1 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Jumlah sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan (kali) | 1 | 1 | 1000,00 | |
| 3.1.2 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah verifikasi banpol (parpol) | 10 | 10 | 100,00 | |
| | | | | | | |
| **4** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat (%)** | **75,00** | **76,20** | **100,00** | **Efsisien** |
| **4.1** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat (%)** | **75,00** | **76,20** | **100,00** | **Efsisien** |
| 4.1.1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan | Jumlah Notulen yang dihasilkan (rekomendaasi) | 2 | 2 | 100,00 | |

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja (satuan) | Pencapaian Kierja | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | |
| | | | | | | |
| **5** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah (%)** | **75,00** | **73,20** | **97,60** | **Efsisien** |
| **5.1** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah (%)** | **75,00** | **73,20** | **97,60** | **Efsisien** |
| 5.1.1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Rekomendasi/Notulen yang dihasilkan (rekomendasi) | 4 | 4 | 100,00 | |
| 5.1.2 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (kali) | 8 | 7 | | |

*Sumber : Evaluasi Terhadap Hasil Renja 2025*

## D. Realisasi Anggaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 6.986.653.325,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.818.212.802,00 atau 97,59%. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melaksanakan 6 program, 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.9**
Realisasi Anggaran Tahun 2025

| Kode Rekening | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **6.986.653.325** | **6.818.212.802** | **97,59** |
| **8.01.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **3.336.218.931** | **3.252.548.186** | **97,49** |
| **8.01.01.2.01** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluaasi Kinerja Perangkat Daerah** | **28.834.000** | **28.669.000** | **99,43** |
| 8.01.01.2.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 28.834.000 | 28.669.000 | 99,43 |
| **8.01.01.2.02** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat** | **2.883.139.022** | **2.800.600.362** | **97,14** |

| Kode Rekening | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | **Daerah** | | | |
| 8.01.01.2.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.883.139.022 | 2.800.600.362 | 97,14 |
| **8.01.01.2.06** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **154.770.409** | **154.679.329** | **99,94** |
| 8.01.01.2.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.100.000 | 6.090.000 | 99,84 |
| 8.01.01.2.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 16.000.000 | 16.000.000 | 100 |
| 8.01.01.2.06.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 27.774.000 | 27.769.500 | 99,98 |
| 8.01.01.2.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.853.409 | 6.852.600 | 99,99 |
| 8.01.01.2.06.08 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2.010.000 | 2.010.000 | 100 |
| 8.01.01.2.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 96.033.000 | 95.957.229 | 99,92 |
| **8.01.01.2.07** | **Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **26.700.000** | **26.700.000** | **100** |
| 8.01.01.2.07.05 | Sub Kegiatan | 7.200.000 | 7.200.000 | 100 |

| Kode Rekening | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | Pengadaan Mebel | | | |
| 8.01.01.2.07.06 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 19.500.000 | 19.500.000 | 100 |
| **8.01.01.2.08** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **121.260.500** | **120.534.820** | **99,40** |
| 8.01.01.2.08.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 750.000 | 750.000 | 100 |
| 8.01.01.2.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.510.500 | 11.784.820 | 94,20 |
| 8.01.01.2.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 108.000.000 | 108.000.000 | 100 |
| **8.01.01.2.09** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah** | **121.515.000** | **121.364.675** | **99,88** |
| 8.01.01.2.09.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 114.500.000 | 114.386.675 | 99,90 |
| 8.01.01.2.09.06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan | 7.015.000 | 6.978.000 | 99,47 |

| Kode Rekening | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | dan Mesin Lainnya | | | |
| **8.01.02** | **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **837.407.200** | **802.882.417** | **95,88** |
| **8.01.02.2.01** | **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **837.407.200** | **802.882.417** | **95,88** |
| 8.01.02.2.01.04 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 198.844.000 | 174.099.196 | 87,56 |
| 8.01.02.2.01.08 | Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka | 638.563.200 | 628.783.221 | 98,47 |
| **8.01.03** | **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** | **2.664.732.194** | **2.635.282.199** | **98,89** |
| **8.01.03.2.01** | **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan** | **2.664.732.194** | **2.635.282.199** | **98,89** |

| Kode Rekening | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | **Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | | | |
| 8.01.03.2.01.03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 1.621.510.000 | 1.609.620.008 | 99,27 |
| 8.01.03.2.01.04 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1.043.222.194 | 1.025.662.191 | 98,32 |
| **8.01.05** | **Program Pembinaan dan Pengembangan** | **24.180.000** | **19.050.000** | **78,78** |

| Kode Rekening | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | **Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | | | |
| **8.01.05.2.01** | **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **24.180.000** | **19.050.000** | **78,78** |
| 8.01.05.2.01.03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Sub Kegiatan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 24.180.000 | 19.050.000 | 78,78 |
| **8.01.06** | **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | **124.115.000** | **108.450.000** | **87,38** |
| **8.01.06.2.01** | **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **124.115.000** | **108.450.000** | **87,38** |
| 8.01.06.2.01.03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan | 59.375.000 | 58.625.000 | 98,74 |

| Kode Rekening | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | |
| 8.01.06.2.01.06 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 64.740.000 | 49.825.000 | 76,96 |

*Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Desember 2025*

# BAB IV
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan gambaran pencapaian kinerja dari perangkat daerah didukung seluruh bidang dan sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disertai dengan analisis terhadap pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis perangkat daerah dengan 5 (lima) indikator kinerja. Sasaran Strategis pertama (S1) adalah "Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota" dengan indikator kinerja adalah "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada". Sasaran Strategis ketiga (S2) adalah "Menurunnya Tingkat Konflik Sosial di Tengah Masyarakat", dengan indikator kinerja yang ditetapkan adalah "persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota". Sasaran Strategis ketiga (S3) adalah "Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah", dengan indikator kinerja Nilai AKIP, Nilai IRB dan Nilai IKM.

Pencapaian Sasaran Strategis S1 adalah sebesar 103,82%, dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun Anggaran 2025. pencapaian sasaran strategis S1 ini mengacu pada pencapaian sasaran strategis S1 tahun 2024 karena pemilu dan pemilukada dilaksanakan sekali 5 (lima) tahun. Pencapaian Sasaran Strategis S2 adalah sebesar 92,00%, berupa fasilitasi penyelesaian konflik di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sasaran Strategis S3 dengan komposisi capaian Nilai AKIP sebesar 113,05% dari target 66,00, capaian IRB sebesar 365,63 % dari target 16 dan capaian Nilai IKM sebesar 84,17% dari target 92,58.

## B. Langkah Peningkatan Di Masa Mendatang

Untuk meningkatkan capaian kinerja dan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintah daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota pada masa yang akan datang, maka diharapkan langkah-langkah peningkatan di masa mendatang sebagai berikut:

a. Perlunya penyesuaian kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengantisipasi perkembangan perubahan peraturan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019.

*b.* Perlunya peningkatkan kualitas kompetensi unsur pimpinan dan pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan, baik oleh Pemerintah, maupun lembaga lainnya, sehingga dapat melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan umum.

*c.* Perlunya peningkatan sarana dan prasarana terutama kendaraan dinas/operasional untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, karena pada saat ini kendaraan dinas roda empat dan roda dua sangat terbatas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan hal ini sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya kegiatan yang dilakukan di Nagari dan Kecamatan.

d. Perlunya dukungan pendanaan yang memadai dalam mengantisipasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang sangat luas, terutama dalam bentuk program dan kegiatan kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal diantaranya: Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM); Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK); pendidikan politik

bagi pemilih pemula; dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah Gunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Payakumbuh,  Februari 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota

**Drs. DEDDY PERMANA, MM**
NIP. 19670810 198809 1 002